

BAB VI

SARAN

6.1. Saran

Saran yang dapat diberikan selama menempuh PKPA di Apotek Kimia Farma 116 adalah sebagai berikut.

1. Mahasiswa harus lebih membekali diri dengan ilmu pengetahuan praktis, ilmu komunikasi, serta kepercayaan diri yang tinggi sehingga dapat menjalankan tugas kefarmasian di Apotek dengan lebih baik.
2. Mahasiswa program studi profesi Apoteker hendaknya berperan aktif dalam melaksanakan semua kegiatan PKPA agar dapat memperoleh semua informasi dan pengalaman yang kiranya berguna untuk kehidupan dunia kerja di masa yang akan datang.
3. Mahasiswa harus melatih diri untuk peduli dan berempati terhadap pasien agar pelayanan yang diberikan lebih maksimal.
4. Apotek harus lebih tekun dalam menerapkan pelayanan kefarmasian yang berpihak kepada pasien dengan meningkatkan penulisan *patient medication record* yang sangat penting untuk merangkum pengobatan dan perkembangan kesehatan pasien.
5. Apoteker harus menggali data pasien agar dapat mencegah terjadinya *drug related problem*, memberitahukan terapi non farmakologi yang dapat dilakukan pasien, serta hal penting lainnya terkait obat seperti efek samping, waktu kadaluarsa (obat racikan), dan cara penyimpanan obat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, S.P., Sekhon, S.S., and Wright, J.M. 2014. Lipid lowering efficacy of rosuvastatin. *Cochrane Database Syst Rev*. doi: 10.1002/14651858.CD010254.pub2
- Anderson, P. O., James E. K., William G. T., 2002, Handbook of Clinical Drug Data 10th ed., The McGraw-Hill Companies, New York.
- British Medical Association (BMA). 2011. *British National Formulary* 61Th Edition. BMJ Group and Royal Pharmaceutical Society, London.
- Depkes, RI, 1990, *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 347/ Menkes/ SK/ VII/ 1990 tentang Obat Wajib Apotek*, Jakarta.
- Depkes RI, 2009, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Jakarta.
- Depkes RI, 2014, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Jakarta.
- Depkes RI, 2015, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan*
- Depkes RI, 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Jakarta.
- Depkes RI, 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang Apotek*, Jakarta.
- Hartini, Y.S. dan Sulasmono. 2007. *Apotek: Ulasan Beserta Naskah Peraturan Perundang-undangan terkait Apotek Termasuk*

Naskah dan Apotek Rakyat. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Information Handbook 17th ed., American Pharmacists Association, New York.

Jones, P.H. *et al.* 2005. Effects of rosuvastatin versus atorvastatin, simvastatin, and pravastatin on non-high-density lipoprotein cholesterol, apolipoproteins, and lipid ratios in patients with hypercholesterolemia: additional results from the STELLAR trial. *Clin. Ther.*, 26(9): 1388-1399.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor. 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2380 Tahun 1983 tentang Tanda Khusus untuk Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas.

Lacy, F.C., Lora, L.A., Morton, P.G., and Leonard, L.L., 2009, Drug Information Handbook 17th ed., American Pharmacists Association, New York.

McEvoy, G.K. *et al.* 2011. *AHFS Drug Information Essentials*. American Society of Health System Pharmacists, Inc., USA.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175 Tahun 2010 tentang Izin Produksi Kosmetika

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 179 Tahun 1974 tentang Produksi dan Distribusi Obat Tradisional

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1989 tentang Kewajiban Menuliskan Resep dan/atau Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.
- Seto, S., Yunita, N., dan Lily, T. 2008. *Manajemen Farmasi*. Airlangga University Press, Surabaya.
- Sweetman, S.C. 2009. *Martindale The Complete Drug Reference 36Th Edition*. Pharmaceutical Press, London.
- Tatro, D.S. 2003. *A to Z Drug Facts*. Facts and Comparisons.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.